



SEBAGAI PENGGANTI BLT

Pemerintah Siapkan Dana PKH Rp 1 T

JAKARTA (KR) - Pada tahun 2009 pemerintah akan mengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan PKH ini akan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 18,8 juta atau 8,2 persen pada tahun 2009. Padahal berdasarkan data BPS hingga saat ini ada sebanyak 37,7 juta rakyat miskin atau 16,58 persen dari total penduduk.

Menurut Mensos Bachtiar Chamsyah di Jakarta, Selasa (26/8), untuk PKH ini pemerintah menyediakan dana hingga Rp 1 triliun. Dengan rincian dipecah ke beberapa instansi yakni Depsos Rp 843,6 miliar, BPS yang mendata rakyat miskin Rp 134,4 miliar, Depkominfo yang menyosialisasikan Rp 20 miliar dan Bappenas yang merancang, memonitoring dan evaluasi program sebesar Rp 2 miliar.

"Untuk tahun 2008 pemerintah dan panggar DPR sudah menganggarkan Rp 1,1 triliun. Padahal sebelumnya kita berharap Rp 3 triliun untuk 1,5 juta rumah tangga sa-

ngat miskin (RTSM). Namun karena kekurangan anggaran, maka hanya untuk tambahan 200.000 rumah tangga. Dengan demikian tahun 2008 akan ada sekitar 700.000 RTSM yang akan mendapatkan bantuan PKH. Untuk RTSM bantuan yang diberikan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 2.200.000 pertahun. Sementara tahun ini jatahnya untuk 500.000 RTSM," jelas Bachtiar.

Skenario bantuan meliputi bantuan tetap Rp 200.000, bantuan pendidikan untuk anak SD atau MI Rp 400.000, bantuan pendidikan SMP Rp 800.000, bantuan kesehatan bagi balita Rp 800.000, ban-

tuan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui Rp 800.000. Dengan demikian rata-rata bantuan sebesar Rp 1.390.000 pertahun dan bantuan maksimal Rp 2.200.000.

"Perhitungan batas minimum dan maksimum ini berdasarkan pada 15-25 persen pendapatan rata-rata rumah tangga sangat miskin pertahun. Bantuan berupa uang tunai itu akan dibayarkan 3 bulan satu kali melalui kantor pos terdekat," tambahnya.

Sementara Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, untuk tahap pertama PKH ini akan dilakukan di 7 propinsi yakni DKI Jakarta, Jatim, Jabar,

NTT, Gorontalo, Sulut, Sumbar.

Yang berhak menerima PKH, lanjutnya, adalah saat pendaftaran mereka memiliki anak usia sekolah 6-15 tahun atau di atas usia 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar. Memiliki anak usia 0-6 tahun, ibu yang sedang hamil. "Dengan syarat tersebut, meskipun rumah tangga itu sangat miskin tetapi tidak ada ibu hamil, tidak bisa mendapatkan bantuan tunai," ujar Paskah.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemberian BLT tahun depan akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Kalau pada tahun 2008, BLT diberikan penuh selama satu tahun, maka tahun 2009 bantuan serupa hanya akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan saja.

(Lmg/Ati/Has) z

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005